

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan pemerintah dalam proses perkembangan ekonomi untuk masing-masing Negara mempunyai tingkatan yang berbeda-beda.<sup>1</sup> Dalam pembangunan negara Indonesia, perekonomian perlu dikembangkan secara terencana dan terpadu. Pembangunan yang dilakukan sudah pasti menuju pada suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan nasional di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim pada umumnya terfokus pada pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia.

Pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat. Namun demikian, tetap harus memperhatikan minoritas yang mempunyai kesamaan hak dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi daerah-daerah di seluruh Indonesia karena pembangunan daerah tidak bisa disamaratakan dengan alasan perbedaan karakteristik, budaya, keadaan sosial dan sebagainya. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan nasional bisa terlihat dari pembangunan daerah-daerah yang ada.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.<sup>3</sup> Pembangunan

---

<sup>1</sup> H. Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm.191.

<sup>2</sup> Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008, hlm. 186.

<sup>3</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

daerah sebagai integral dari pembangunan nasional, merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya melibatkan seluruh kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat diberbagai sektor.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.<sup>5</sup> Pembangunan ekonomi harus sesuai dengan kondisi potensi daerah serta aspirasi masyarakat. Apabila pelaksanaan pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak pada posisi  $110^{\circ} 9' 48", 02''$  sampai  $110^{\circ} 58' 37, 40''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 43' 20, 67''$  sampai  $6^{\circ} 47' 25, 83''$  Lintang Selatan. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.<sup>6</sup> Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Bambang Prishardoyo, *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati tahun 2000-2005*, Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2008, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>6</sup> Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Jepara, *Obyek Wisata Legenda dan Budaya Jepara*, Jepara, 2001, hlm. 19.

<sup>7</sup> <http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pusat-dan-pemerintah-daerah.html> (02-01-2017)

Kabupaten Jepara sebagai salah satu daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya. Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan Gas, pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan dan jaminan nasional, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut**  
**Lapangan Usaha Kabupaten Jepara Tahun 2013-2015**  
**(dalam miliar rupiah)<sup>8</sup>**

No	Sektor (Lapangan Usaha)	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.442,71	2.374,20	2.444,16
2	Pertambangan dan Penggalian	284,63	296,11	300,90
3	Industri Pengolahan	5.140,57	5.472,14	5.756,34
4	Pengadaan Listrik dan GAS	18,71	18,86	18,91
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	12,43	12,79	13,03
6	Konstruksi	1.007,48	1.050,53	1.103,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.815,81	2.933,00	3.072,17
8	Transportasi dan Pergudangan	650,67	695,08	735,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Minum	605,11	661,86	715,42
10	Informasi dan Komunikasi	394,60	468,28	523,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	324,64	339,18	357,15
12	Real Estate	269,31	286,82	305,84
13	Jasa Perusahaan	69,87	75,58	82,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Nasional	399,80	399,36	417,01
15	Jasa Pendidikan	689,18	764,99	803,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,00	146,36	157,93
17	Jasa Lainnya	349,34	378,98	390,15
	<b>Jumlah</b>	<b>15.602,87</b>	<b>16.374,13</b>	<b>17.197,79</b>

Sumber : BPS Kabupaten Jepara Tahun 2013-2015

Berdasarkan tabel 1, roda perekonomian di Kabupaten Jepara digerakkan oleh tiga pilar utama yaitu industri, pertanian dan perdagangan. Dinamika yang terjadi pada tiga sektor ini sangat berperan dalam

<sup>8</sup> Katalog BPS, *PDRB Kabupaten Jepara*, Andalan kita, Jepara, 2014, hlm. 11.

perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Jepara. Tiang penyangga perekonomian Kabupaten Jepara tahun 2015 masih bertumpu pada sektor industri pengolahan karena menyumbangkan nilai tambah sebesar 5.756,34. Jenis industri utama di Kabupaten Jepara adalah meubel dan ukiran kayu. Sedangkan industri lain adalah tenun ikat, konveksi, makanan dll. Sektor pertanian senantiasa mengalami dinamika, pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 2.444,16 pada tahun ini lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya hanya 2.374,20. Pasang surut disektor pertanian dan industri berpengaruh pada perkembangan sektor perdagangan, pada tahun 2015 sektor perdagangan sebesar 3.072,17.<sup>9</sup>

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk mengalami peningkatan, namun masih banyak penduduk yang masuk kategori dibawah standar. Hal ini membuktikan bahwa fondasi perekonomian daerah belum sepenuhnya kokoh karena masih besarnya rasio kesenjangan pendapatan antar penduduk dan antar wilayah.

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Jepara menandakan bahwa sektor mata pencaharian belum dimaksimalkan potensinya oleh pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Jepara secara tidak langsung menggambarkan bahwa garis kesejahteraan masyarakat masih rendah, yang berarti tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi.<sup>10</sup> Sedangkan Globalisasi mengharuskan daerah-daerah dalam wilayah nasional untuk bersaing dalam perdagangan bebas secara kompetitif dengan produk negara-negara dari seluruh dunia. Pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan bermutu yang dapat bersaing dalam kompetisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>11</sup> Fakta dari pemerintah daerah menyatakan bahwa perkembangan sosial ekonomi di Kabupaten Jepara masih harus

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>10</sup> Katalog BPS, *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jepara 2012-2014*, Andalan Kita, Jepara, 2014, hlm. 43-44.

<sup>11</sup> Yolamalinda, Analisis Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Kabupaten Agam, Jurnal, Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Padang, 2014, hlm. 28.

dioptimalkan. Sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan demi perkembangan di berbagai aspeknya, disisi lain perkembangan sosial ekonomi berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang lebih baik. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah peran pemerintah sangat diperlukan yaitu dalam pembuatan strategi dan perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun .

Dengan seluruh kondisi di atas, perubahan sektoral yang terjadi telah didasarkan pada strategi kebijakan pembangunan yang tepat yaitu strategi yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk.<sup>12</sup> Karena untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan pada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda dan mencoba menggambarkan pola perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian, serta menentukan sektor-sektor unggulan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara. Melihat dari pemikiran di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Komoditi Unggulan di Kabupaten Jepara**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui potensi ekonomi daerah yang lebih difokuskan pada potensi ekonomi dalam pengembangan komoditi unggulan di Kabupaten Jepara.

---

<sup>12</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

**C. Rumusan Masalah**

1. Sektor-sektor apa yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian regional maupun lokal Kabupaten Jepara?
3. Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Jepara dalam perspektif islam?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis perubahan dan pergeseran perekonomian wilayah di Kabupaten Jepara.
3. Untuk menentukan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Jepara.

**E. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian tersebut diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah khasanah kepustakaan mengenai ekonomi pembangunan.
  - b. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait mengenai potensi ekonomi Kabupaten Jepara.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pelaku Bisnis

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan potensi ekonomi sesuai yang diharapkan.
  - b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk penetapan kebijakan yang akan datang yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, abstraksi, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman pengantar, dan halaman isi

### 2. Bagian isi

Bagian isi terdiri atas 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan juga mengungkapkan kerangka pemikiran.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian sumber data, lokasi penelitian teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil dari penelitian.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup

### 3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.